KAJIAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PROSES BERACARA PERDATA DI INDONESIA (STUDY OF THE PRINCIPLES OF SIMPLICITY, SPEED AND LOW COST IN CIVIL LITIGATION PROCESSES IN INDONESIA)

Fauziah Lubis¹, Nabilah Eka Putri², Adelina³, Mutia Khairani⁴, Sinar Hidayat Habeahan⁵, Uci Pinkan Sari⁶
^{1,2,3,4,5,6}Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Email: fauziahlubis@uinsu.ac.id, nbleka03@gmail.com

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam proses beracara perdata di Indonesia efektif dalam mempermudah akses masyarakat terhadap keadilan. Dengan berlatar belakang kebutuhan akan proses beracara yang efisien dan terjangkau, mengingat masih terdapat kendala seperti formalitas yang berlebihan dan kurangnya kerja sama dari pihak berperkara yang menghambat pelaksanaan asas tersebut. Metode normatif digunakan untuk menganalisis regulasi dan praktik pengadilan guna mengidentifikasi tantangan serta menawarkan solusi inovatif, seperti penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan teknologi informasi. Studi ini menemukan bahwa meskipun asas tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, penerapan yang konsisten dan menyeluruh sangat dibutuhkan agar sistem peradilan menjadi inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Asas ini menghendaki penyelesaian perkara secara efisien tanpa mengabaikan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Langkah seperti penggabungan perkara terkait dan mekanisme pemanggilan yang lebih sederhana dapat meningkatkan efektivitas asas ini. Oleh karena itu, artikel ini memberikan rekomendasi penting bagi para pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan akses dan kualitas keadilan di Indonesia melalui penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan secara optimal.

Kata Kunci: *Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Proses Beracara, Perdata.*

Abstract

This paper aims to examine the extent to which the application of the principle of simple, fast, and low cost in the civil procedure process in Indonesia is effective in facilitating public access to justice. Against the background of the need for an efficient and affordable procedural process, considering that there are still obstacles such as excessive formalities and lack of cooperation from litigants that hinder the implementation of these principles. Normative methods are used to analyze court regulations and practices to identify challenges and offer innovative solutions, such as simplifying procedures and utilizing information technology. This study found that although this principle has been regulated in Law No. 48 of 2009, consistent and comprehensive implementation is needed so that the justice system becomes inclusive and responsive to the needs of the community. This principle requires the efficient resolution of cases without neglecting the thoroughness of seeking truth and justice. Measures such as the merging of related cases and simpler summons mechanisms can increase the effectiveness of this principle. Therefore, this article provides important recommendations for interested parties to improve access and quality of justice in Indonesia through the optimal application of simple, fast, and low-cost principles.

Keywords: *Simple Principle, Fast and Low Cost, Procedural Process, Civil*

PENDAHULUAN

Sistem hukum di Indonesia merupakan hasil konstruksi yang kompleks dan dinamis, terbentuk melalui perjalanan sejarah panjang serta interaksi berbagai budaya, politik, dan

sosial di Nusantara. Sejak masa penjajahan hingga kemerdekaan, sistem hukum Indonesia mengalami berbagai perubahan dan adaptasi yang mencerminkan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Keberagaman etnis, budaya, dan agama di Indonesia mendorong adopsi sistem hukum pluralistik yang menggabungkan hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional yang diatur oleh negara. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia berkomitmen membangun sistem peradilan yang menjunjung tinggi supremasi hukum sekaligus berorientasi pada keadilan sosial. Sebagai negara hukum yang berlandaskan keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, Indonesia menempatkan sistem peradilan pada posisi sangat penting untuk melindungi hak-hak warga negara serta menjaga keteraturan di tengah masyarakat. Untuk mencapai keadilan sosial, prinsip penyelenggaraan peradilan yang mudah, cepat, dan murah menjadi dasar utama dalam penanganan kasus, khususnya perkara perdata. Prinsip ini bukan sekadar tuntutan hukum, melainkan juga kebutuhan nyata agar semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, dapat memperoleh akses ke peradilan. Proses hukum yang panjang, rumit, dan mahal justru menjadi penghalang bagi masyarakat, terutama mereka yang berasal dari kalangan ekonomi lemah. Maka, penerapan prinsip ini menjadi landasan utama dalam pembaruan hukum demi terwujudnya sistem peradilan yang efektif, terbuka, dan dapat dijangkau semua orang.

Prinsip yang mewajibkan peradilan berjalan secara cepat, mudah, dan terjangkau mengharuskan penegakan hukum di Indonesia selalu mengacu pada asas tersebut. Hal ini bertujuan agar perlindungan dan kepastian hukum dapat diberikan kepada setiap pencari keadilan yang terlibat dalam proses hukum. Asas peradilan cepat dimaksudkan agar kasus dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, tanpa penundaan atau proses yang berlarut-larut, sehingga status perkara tetap jelas. Sementara itu, asas peradilan sederhana menekankan pentingnya penyelesaian perkara secara efisien dan langsung, tanpa prosedur yang berbelit-belit. Adapun asas biaya ringan menuntut agar biaya yang dikenakan dalam proses peradilan tetap terjangkau oleh berbagai kalangan Masyarakat, tanpa mengorbankan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, proses peradilan tidak boleh membebani pihak yang terlibat dengan biaya yang tinggi. Berbagai peraturan pelaksana dan kebijakan peradilan juga mengatur mekanisme penerapan asas ini, seperti penyederhanaan prosedur, pengurangan biaya perkara, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses peradilan. Namun, penerapan asas ini menghadapi tantangan

kompleks, baik dari faktor internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan budaya kerja di lembaga peradilan, maupun faktor eksternal seperti tingkat pendidikan hukum masyarakat dan dukungan pemerintah.

Salah satu hambatan utama adalah formalitas yang kaku dan prosedur berbelit-belit, yang menyebabkan perkara sederhana menjadi terhambat oleh proses administrasi yang lama. Selain itu, kurangnya disiplin dan profesionalisme para pihak berperkara dan aparat peradilan turut memperlambat penyelesaian perkara. Dari sisi biaya, meskipun ada ketentuan biaya perkara yang terjangkau, biaya litigasi masih menjadi beban berat bagi sebagian masyarakat, termasuk biaya pengacara, transportasi, dan waktu yang hilang. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan akses keadilan, di mana hanya mereka dengan sumber daya cukup yang dapat mengakses sistem peradilan secara optimal. Pentingnya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak hanya terletak pada aspek teknis proses hukum, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat luas. Akses keadilan yang efisien dan terjangkau merupakan hak fundamental yang harus dijamin negara sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Ketika asas ini tidak terpenuhi, kesenjangan sosial akan melebar, dengan kelompok masyarakat kurang mampu semakin terpinggirkan. Kesenjangan ini dapat menimbulkan konflik sosial, ketidakpastian hukum, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh sebab itu, memperkuat penerapan asas ini menjadi agenda penting dalam reformasi hukum dan peradilan di Indonesia. Dalam meningkatkan kaidah penerapan asas tersebut, Indonesia dapat belajar dari pengalaman yang telah berhasil mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses peradilan. juga menerapkan prosedur yang lebih fleksibel dan berorientasi pada penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien. Pengalaman ini dapat menjadi acuan bagi Indonesia dalam reformasi sistem peradilan agar lebih responsif dan inklusif.

Meskipun asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sangat penting, hal ini tidak boleh mengorbankan kualitas dan keadilan substantif dalam putusan peradilan. Keseimbangan antara efisiensi proses dan ketelitian penilaian hukum harus dijaga agar keputusan yang dihasilkan adil dan diterima masyarakat. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengintegrasikan asas ini dengan prinsip keadilan prosedural dan substantif, sehingga sistem peradilan tidak hanya cepat dan murah, tetapi juga benar-benar adil. Tantangan lain yang signifikan adalah rendahnya tingkat pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat

tentang hak-hak mereka dalam proses hukum. Banyak individu tidak memahami prosedur hukum atau hak dasar mereka saat berhadapan dengan sistem peradilan, yang menyebabkan ketidakadilan tidak disadari dan menghambat akses keadilan. Oleh karena itu, penyuluhan hukum yang intensif dan sistematis sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, sehingga mereka dapat lebih aktif dan mandiri dalam memperjuangkan haknya.

Biaya litigasi yang tinggi sering menjadi penghalang utama bagi masyarakat kurang mampu dalam mengakses peradilan. Untuk itu, penyediaan bantuan hukum yang memadai menjadi solusi penting. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat program bantuan hukum, baik melalui layanan gratis maupun subsidi biaya perkara. Bantuan hukum tidak hanya meringankan beban biaya, tetapi juga memberikan pendampingan profesional sehingga masyarakat dapat memahami proses hukum dan mengambil langkah tepat dalam penyelesaian perkara, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas dan aksesibilitas sistem peradilan. Secara keseluruhan, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip krusial dalam mewujudkan sistem peradilan berkeadilan sosial di Indonesia. Walaupun telah diatur secara normatif, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Melalui penelitian dan reformasi yang inovatif dan aplikatif, diharapkan hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi sehingga sistem peradilan Indonesia menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan menjamin akses keadilan yang merata.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Penerapan Asas Sederhana, cepat dan Biaya Ringan Dalam Proses Beracara Perdata Di Indonesia?
2. Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan?
3. Bagaimana Pengaruh Formalitas Dan Prosedur Yang Rumit Terhadap Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode aturan normatif dengan fokus pada analisis tata cara serta peraturan yang berkaitan dengan kajian asas sederhana, cepat, biaya ringan pada proses beracara perdata pada Indonesia. sumber data meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pengadilan, dan literatur aturan, jurnal, serta artikel yg relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan analisis normatif untuk mengkaji norma-istiadat aturan yang mendasari asas tersebut. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan kajian penerapan asas pada praktik pengadilan serta dampaknya bagi pihak-pihak yang berperkara, dengan perbandingan terhadap praktik aturan pada negara lain yang menerapkan prinsip serupa. Penelitian ini bertujuan menyampaikan pemahaman tentang efektivitas asas tersebut dan rekomendasi perbaikan berdasarkan analisis tata cara yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas sederhana, cepat serta biaya ringan artinya Hakim wajib mengupayakan penyelesaian masalah secara optimal menggunakan mengedepankan prinsip kesederhanaan, kecepatan, serta porto yg ringan, sehingga masalah dapat diselesaikan pada waktu yang tidak terlalu lama tanpa penundaan yang tidak perlu. Asas sederhana, cepat, porto ringan tercantum pada Pasal dua ayat (4) Undang Undang nomor 48 Tahun 2009 ihwal Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, serta porto ringan”. pada rangka menjamin keadilan bagi semua seluruh masyarakat, sistem peradilan di Indonesia menekankan pentingnya asas yg mengedepankan proses yang efisien, tidak berbelit-belit, dan minim porto, yg artinya prinsip esensial dalam penyelenggaraan peradilan.

Yahya Harahap berpendapat bahwa prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan mencerminkan proses pemeriksaan perkara yang seharusnya tidak berlangsung dalam waktu yang terlalu lama, apalagi hingga bertahun-tahun. Kesederhanaan dalam tata cara beracara hukum perlu senantiasa diutamakan, sehingga hakim tidak boleh memperumit proses persidangan dengan prosedur yang berbelit-belit atau berjalan terlalu lama. Pengadilan tidak semestinya menunda-nunda pemeriksaan perkara secara berulang tanpa alasan yang sah dan jelas secara hukum. Meskipun proses persidangan dan

pemeriksaan perkara dijalankan dengan prinsip kesederhanaan, kecepatan, serta efisiensi biaya, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi kewajiban untuk tetap teliti dalam menilai aspek hukum dan keadilan. Prinsip kesederhanaan serta percepatan proses tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kebenaran materiil atau mencederai keadilan. Seluruh tahapan pemeriksaan tetap harus dilakukan secara seksama dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agar proses persidangan dapat berjalan efektif, hakim dituntut untuk memiliki integritas dan kompetensi profesional yang tinggi dalam menangani setiap perkara, sehingga masalah hukum dapat diselesaikan secara efisien dan terwujudlah proses persidangan yang sederhana, cepat, serta hemat biaya. Dengan demikian, tujuan utama dari asas ini adalah terciptanya proses pemeriksaan yang efisien, sehingga perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, sejalan dengan prinsip kesederhanaan dalam tata cara beracara.

Landasan Hukum Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip fundamental yang memiliki kedudukan sangat penting, setara dengan asas-asas lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, khususnya pada Pasal 57 ayat (3). Asas ini bersumber dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Prinsip ini menekankan bahwa pelaksanaan peradilan harus dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan, yang menginginkan proses peradilan yang tidak hanya adil dan tepat, tetapi juga berjalan secara cepat serta tidak memberatkan biaya. Penjelasan lebih lanjut mengenai makna asas ini dapat ditemukan dalam bagian penjelasan umum serta penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang secara tegas menyatakan bahwa:

“Peradilan harus memenuhi asa dan pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yg cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. tak dibutuhkan investigasi serta acara yang berbelit yang bisa mengakibatkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang wajib dilanjutkan sang para pakar waris pencari keadilan. porto ringan yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini seluruh dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan”.

Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak secara detail mengatur tentang asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, namun asas ini tetap ditegaskan sebagai salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan peradilan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 57 ayat (3) serta penjelasan umum nomor 5 paragraf kelima, yang menegaskan kembali prinsip-prinsip pokok peradilan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Di antaranya adalah sidang yang bersifat terbuka untuk umum, dimulainya setiap putusan dengan kalimat *“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,”* serta pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat, dan murah. Semua prinsip ini dijelaskan kembali secara eksplisit dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar yang kuat bagi penyelenggaraan peradilan yang tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga memprioritaskan kemudahan akses dan efisiensi bagi masyarakat yang mencari keadilan.

Implementasi Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan menuntut hakim serta aparat peradilan untuk melaksanakan pemeriksaan perkara dengan sikap yang akomodatif, yakni tidak terburu-buru tetapi pula tak sengaja memperlambat persidangan. Tujuannya supaya proses peradilan berlangsung efisien serta efektif tanpa mengorbankan ketepatan investigasi dan penilaian aturan serta keadilan. Kesederhanaan dan kecepatan tak boleh dijadikan alasan mengabaikan prinsip keadilan serta kebenaran yg harus ditegakkan hakim.

Asas ini artinya kesatuan yang saling melengkapi; mekanisme yg sederhana akan meningkatkan kecepatan penyelesaian masalah sehingga biaya bisa ditekan seminimal mungkin. dengan demikian, peradilan menjadi lebih mudah diakses rakyat, menyampaikan kepastian hukum pada ketika wajar serta biaya terjangkau.

Langkah implementasi asas ini meliputi:

- a. Penyederhanaan prosedur agar tidak berbelit serta menghindari formalitas berlebihan.
- b. Penetapan jadwal persidangan yg ketat serta disiplin buat menghindari penundaan tak beralasan.

- c. Pemanfaatan teknologi informasi, untuk buat meningkatkan kecepatan administrasi serta pengajuan masalah.
- d. Penggabungan masalah terkait agar penyelesaian lebih efisien.
- e. supervisi ketat terhadap porto kasus agar permanen ringan dan terjangkau masyarakat.

Semua langkah tersebut difokuskan agar proses peradilan dapat berlangsung secara cepat, efisien, dan dengan biaya terjangkau, tanpa mengorbankan keadilan serta kualitas putusan yang selaras dengan ketentuan hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan menerapkan prinsip ini secara konsisten, lembaga peradilan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mewujudkan keadilan yang substantif maupun prosedural secara bersamaan.

Hambatan dan Solusi Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Berdasarkan kondisi dan tingkat penyelesaian kasus, ada perkara yang dapat diselesaikan pada waktu 1 hingga 6 bulan, sementara terdapat pula yang baru terselesaikan sesudah melewati 6 bulan, bahkan beberapa masih belum terselesaikan sesudah jangka waktu tersebut. Hal ini memberikan bahwa pengadilan bisa menuntaskan beberapa perkara menggunakan cepat, namun terdapat pula yg mengalami keterlambatan.

Keterlambatan penyelesaian masalah pada pengadilan ditimbulkan sang aneka macam kendala yg menghalangi penerapan asas peradilan yg sederhana, cepat, dan biaya ringan. kendala-hambatan ini ada berasal faktor internal juga eksternal pengadilan, seperti kurangnya disiplin berasal para pihak yg berperkara, keterbatasan sumber daya, dan hambatan administrasi serta manajemen waktu pada pengadilan.

Hambatan Penerapann Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan:

- Formalitas dan mekanisme aturan yang kaku menyebabkan proses litigasi menjadi lambat dan berbelit, sehingga akibatnya sulit menerapkan asas sederhana dan cepat.
- Ketidakooperatifan para pihak dalam proses peradilan, seperti menunda-nunda persidangan atau tidak hadir, memperlambat penyelesaian perkara.

- Perbedaan wilayah tempat tinggal para pihak serta alamat yang tidak kentara menyulitkan pemanggilan serta proses persidangan cepat.
- Penggunaan pembela terdakwa resmi (lawyer) yang kadang memperpanjang proses menggunakan seni manajemen hukum eksklusif.
- Biaya perkara yang masih tinggi akibat lamanya proses serta prosedur yang rumit, sehingga akibatnya tidak sesuai dengan asas biaya ringan.
- Putusan pengadilan yang tidak efektif dan sulit dilaksanakan sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum serta ketidakpuasan.

Solusi Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

- Penyederhanaan mekanisme peradilan dengan mengurangi formalitas yg tak perlu agar proses lebih efisien serta efektif.
- Optimalisasi mekanisme pemanggilan mirip menggunakan surat tercatat buat meningkatkan kecepatan proses pemanggilan pihak terkait.
- Penggabungan kasus yg berkaitan erat (misal cerai gugat serta pembagian harta bersama) buat menghemat waktu dan biaya .
- Peningkatan koordinasi dan komunikasi antara hakim serta para pihak supaya proses berjalan lancar tanpa penundaan yang tidak perlu.
- Penguatan regulasi dan supervisi supaya proses peradilan tidak berlarut dan biaya permanen terjangkau rakyat.
- pelaksanaan mediasi serta penyelesaian alternatif sengketa buat mengurangi beban masalah di pengadilan serta meningkatkan kecepatan penyelesaian.

KESIMPULAN

Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan di Indonesia bertujuan untuk mempermudah akses keadilan, menyederhanakan prosedur hukum, mempercepat penyelesaian perkara, serta menekan biaya agar tidak memberatkan masyarakat. Dasar Hukum prinsip ini diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan perlunya proses peradilan yang efisien, adil, dan terjangkau.

Implementasi pelaksanaan asas ini memerlukan pengurangan formalitas, pemanfaatan teknologi, serta koordinasi yang baik antara hakim dan pihak berperkara agar proses berjalan lancar dan efektif. Hambatan kendala penerapan meliputi prosedur yang rumit, kurangnya pemahaman masyarakat, sikap tidak kooperatif dari pihak terkait, dan tingginya biaya litigasi yang menghambat akses keadilan. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut, perlu dilakukan penyederhanaan prosedur, peningkatan sosialisasi hukum, penggunaan mekanisme mediasi, serta penguatan regulasi dan pengawasan agar proses peradilan lebih efisien dan terjangkau. Secara keseluruhan, konsistensi dalam menerapkan asas ini sangat penting untuk mewujudkan sistem peradilan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, Sayed. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli. *Syiah Kuala Law Journal*, Vol 3 No.3.
- Fathona, Cici & Lubis, Fauziah. (2024). Analisis Strategi Hukum Dalam Mempercepat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Perdata. *Judge: Jurnal Hukum*, Vol 5 No.2.
- Hasanuddin, Ahmad Waliyuddin, dkk. (2023). Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Waris Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol 4 No.3.
- Ilham, Maya Hildawati. (2017). Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan. *Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret*, Vol 7 No.3.
- Iskandar, Mizaj, dan Agustina, liza. (2019). Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 3 No.1.
- Lubis, F & Khassa, Fahrul Raji. (2024). Prosedur Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol 6 No.3.
- Mahardipa, Made Witama. (2019). Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Pada Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, Vol 2 No.3.
- Syarif, Zulfadin. (2024). Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Ketentuan Persidangan Hybrid Perkara Perdata. *Collegium Studiosum Journal*, Vol 7 No.1.
- Widowati. (2021). Hambatan Dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. *Jurnal Hukum-Yustitiabelen*, Vol 7 No.1.